



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Tahun Sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2022
Waktu : 14.00 s.d 15.55 WIB
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, SH., MH./F-P
Gerindra/Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat : Novianti/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR
RI
Acara : Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
PPATK Tahun Anggaran 2023

Hadir : **A. Anggota Komisi III:**
39 dari 53 Anggota Komisi III

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil
Ketua/ F-PG)
3. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H.
(Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua
/F-PAN)

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN: 11 Anggota dari 11 Anggota Komisi III:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta, S.H.

9. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
11. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 Anggota dari 7 Anggota Komisi III:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M. Kn
6. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 Anggota dari 7 Anggota Komisi III:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
3. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.
5. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota Komisi III:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Y. Jacky Uli
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 Anggota dari 5 anggota Komisi III:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.,M.A.P
3. Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota Komisi III:

1. Dr. Hince I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H. M.M.
3. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota Komisi III:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam
2. Mulfachri Harahap.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota Komisi III:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

Undangan : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK): Ivan Yustiavandana

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pimpinan Kepala PPATK, beserta jajaran.

Hari ini kita membahas tentang anggaran, sama penjelasan Kepala PPATK, berkaitan dengan RKA KL tahun anggaran 2023, diskusi, tanya jawab, kesimpulan, dan penutup.

Untuk itu kami persilakan untuk mempresentasikan catatan-catatannya, ringkas padat, karena ini pada prinsipnya kita bicara angka-angka, dan angka-angka ini peruntukannya untuk apa, karena dalam rangka anggaran yang berbasis kinerja, tentunya nanti ada catatan-catatan tentang kinerja PPATK ini, di tengah kondisi sosial politik kita gimana, apakah anggarannya rasional, atau gimana, itu kami persilakan.

KEPALA PPATK (IVAN YUSTIAVANDANA):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera.

Om swastiastu,

Shalom,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Bagi kita semua.

Yang kami muliakan Pimpinan Komisi III DPR RI, Pimpinan Rapat,
Yang kami muliakan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Bapak dan Ibu para hadirin rapat kerja.

Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan ridha-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada majelis yang mulia ini.

Sebagai salah satu bentuk dedikasi pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta, yang telah memasuki usia 77 tahun, izin Pak Pimpinan rapat, kami didampingi oleh teman-teman, ada Sekretaris, Plt Sekjen, Plt Sestama, Pak Albert, kemudian ada Plt Deputy Analisis dan Pemeriksaan, Pak Danang, di samping kiri saya ada Plt Deputy Strategis dan Kerjasama, dan di paling ujung Plt apa, Deputy Pengawas Kepatuhan.

Sekali lagi kami mengemukakan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, yang selalu memberikan ... dan dukungan secara penuh, kepada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan. Sesuai dengan surat undangan dari DPR RI, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan rencana kerja dan anggaran PPATK tahun 2023.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, PPATK mendapatkan pagu anggaran sebesar 292 miliar, yang akan digunakan untuk membiayai dua program.

Pertama program dukungan manajemen sebesar 193,2 miliar, pagu pada program dukungan manajemen sudah termasuk belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar 161,9 miliar, dan kedua, program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme sebesar 98,8 miliar.

Secara keseluruhan, pagu anggaran tahun 2023 tersebut kami gunakan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan PPATK dalam rangka mewujudkan efektivitas, pencegahan, dan pemberantasan, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK tahun 2020-2024.

Berdasarkan pemetaan terhadap isu-isu strategis dan kegiatan prioritas PPATK, maka tema Renja PPATK Tahun Anggaran 2023 adalah optimalisasi, pencegahan, dan pemberantasan TPPU, untuk peningkatan penerimaan negara, serta mendukung program *green* ekonomi dan penyelenggaraan pemilu bersih tahun 2024, yang berfokus pada.

Satu, peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi kemajuan finansial teknologi, antara lain, peremajaan *hardware* secara terintegrasi. Kedua penguatan sinergi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force antara lain, tindak lanjut hasil *mutual evaluation review* atau MER. Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT. Kelima, melanjutkan pengukuran

kinerja anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme antara lain pengukuran indeks efektivitas TPPU dan TPPT. Keenam, peningkatan kualitas manajemen internal berdasarkan *good governance* antara lain, peningkatan kompetensi SDM PPATK.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dalam ARPJMN 2020-2024, yaitu menjaga stabilitas keamanan nasional melalui penguatan sistem antikorupsi, pada tahun 2023 PPATK berkomitmen melanjutkan program prioritas nasional tahun 2022 yaitu pendidikan dan pelatihan AKUPPT bagi aparat penegak hukum.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III atas segala dukungan yang telah diberikan kepada PPATK selama ini, sehingga dalam penetapan pagu anggaran tahun 2023, PPATK mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar 75 miliar, dari semula 217 miliar, menjadi 292 miliar. Meskipun permintaan PPATK pada saat rapat sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 81,4 miliar.

Tambahan alokasi anggaran sebesar 75 miliar tersebut, kami akan gunakan untuk mendukung kinerja PPATK agar lebih optimal yaitu akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

Satu, peningkatan kualitas sistem teknologi informasi PPATK. Kedua, peningkatan kapabilitas dan sinergi pihak pelapor dan aparat penegak hukum. Ketiga, pembentukan Collaborative Analysis Team. Keempat, pelaksanaan analisis dan pemeriksaan dalam mendukung peningkatan penerimaan negara mengawal program *green* ekonomi dan pemulihan ekonomi yang bersih pada tahun 2024 melalui edukasi publik. Kelima, peningkatan kualitas manajemen internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK.

Adapun detail Rencana Kerja PPATK tahun 2023 sebagaimana termuat dalam bahan RDP yang telah kami sampaikan kepada yang mulia semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami muliakan, PPATK senantiasa fokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana kerja Pemerintah, yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dengan penerapan pola kerja baru, dan kami senantiasa berkomitmen untuk mengelola APBN secara akuntabel, efektif, efisien, dan *value for money*, dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas segala dukungan yang telah diberikan kepada PPATK selama ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pagu indikatif tahun 2023, 217, minta tambahan ya, usulan tambahan 81 miliar lebih. Ada beberapa hal yang harus dikritisi.

Yang pertama adalah, tadi disebutkan bahwa PPATK ini sebenarnya adalah membantu pemerintah dalam rangka hal-hal yang gelap jadi terang, bukan yang terang jadi gelap, kan begitu sebenarnya. Tadi ada beberapa catatan yang diadakan masyarakat dan organisasi profesi misalnya, karena ini anggaran berbasis kinerja, tentunya, apakah anggaran yang diberikan oleh Komisi III, ini sesuai dengan tupoksi yang tadi dipaparkan, misalnya PPATK cenderung membuat aturan hukum yang di luar kapasitasnya. Misal, Peraturan PPATK Nomor 10 misalnya, kalau tidak salah tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Advokat terhadap Kemandirian Advokat. Ini kan membuat aturan baru, membuat hukum baru yang dalam konteks profesi advokat ada undang-undangnya, misalnya juga aduan ke Komisi III, notaris-notaris ada aturan yang berkaitan dengan notaris melaporkan juga.

Nah yang ingin kita tanyakan, relevansinya dengan posisi PPATK dengan bikin peraturan-peraturan yang bagi, institusi atau kelembagaan yang ada undang-undangnya, ini ada tabrakan, kesan yang ada adalah PPATK membuat hukum yang bukan kepastian hukum yang dia harus dia lakukan, kenapa, pembuat hukum itu kan Pemerintah bersama DPR. Kalau ada tindak lanjut dari Undang-Undang Advokat atau Undang-Undang Notaris, itu kan ada PP, kok PPATK lewat peraturannya, menginterupsi undang-undang, ini yang diadakan di Komisi III. Maka saya tanyakan, kinerja PPATK dalam konteks anggaran, ini ada biayanya enggak yang di pungut dari anggaran yang ada, satu.

Yang kedua, kebiasaan membuat aturan yang non mempertimbangkan dari undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang Advokat, Undang Undang Notaris, ini kan sesuatu hal dalam dunia hukum agak aneh, dan beberapa organisasi advokat, itu mengadakan ke Komisi III, bertanya ke Komisi III, ini memang kapasitas PPATK atau bukan, kami susah juga menjawabnya. Ini yang harus kita klarifikasi juga dalam rangka anggaran berbasis kinerja ini. Nah tolong ini dijelaskan dulu, nanti Anggota akan bertanya yang lain, silakan.

KEPALA PPATK:

Ya terima kasih yang Mulia.

Jadi memang jika dalam, jika kita melihat dalam perspektif **APUPPT** yang mulia, jadi notaris, profesi apa, segala macam itu, kita sebut sebagai dan ..., dia berdasarkan skema internasionalnya, dia adalah profesional yang memang berdasarkan apa, rekomendasi FATF memang harus diatur menjadi bagian dari pihak pelapor itu, *best practice* nya. Nah dalam konteks Indonesia, memang di dalam, di dalam ketentuan pasal apa, di dalam ketentuan Undang-Undang 8/2010, yang namanya, pasal, Pasal 17, dia bukan menjadi bagian dari pihak pelapor, tapi memang PPATK bisa mengatur pihak pelapor lain.

Nah untuk terkait dengan apa, mewajibkan para profesi ini, yang kita sebut yang mulia, kita sebut dengan *gate keeper*, kita sudah bahas beberapa kali di komisi

yang terhormat ini, dia memang dijadikan sebagai pihak pelapor, karena kita mencoba patuh terhadap apa, rekomendasi internasional, seperti yang kita di, yang kami sampaikan tadi yang mulia. Terkait dengan Financial Asian Task Force, salah satu yang memang wajib diatur itu adalah pihak profesi, dan kita sudah bicarakan itu, bahkan dengan asosiasi, dengan Kumham, dan segala macam.

KETUA RAPAT:

Pertanyaannya, jangan pakai aturan internasional.

KEPALA PPATK:

Ya.

KETUA RAPAT:

Hukum positif kita Pak, ini Republik Indonesia.

KEPALA PPATK:

Iya siap.

KETUA RAPAT:

Kalau mau diadopsi hukum internasional kita, kita bikin dulu undang-undang pokoknya, apa undang-undang pokoknya, misalnya perampasan aset, undang-undang apalagi yang diperlukan oleh PPATK, beresin itu dulu itu. Jadi kalau itu belum ada, bukan hukum positif, hukum internasional, kecuali kita ratifikasi gitu loh.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

Kita khawatir, institusi digugat jadi kalah gitu.

KEPALA PPATK:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kekhawatiran ini kan merusak institusi PPATK, itu kenapa kami ngomong ini gitu, ngerti enggak, ya kita jaga, PPATK kita jaga, jangan sampai kalau mereka komplain ada peradilan dan PPATK seolah-olah bikin aturan sendiri, atau judicial, judicial review dan macam-macam. Kehati-hatian itulah yang hari ini harus kita awasi, kenapa, pada konteks anggaran ini kita ingin melihat, apa yang belum maksimal dengan anggaran yang hari ini minta tambah? kan begitu Pak ya. Karena kita ingin melihat, apa yang dilakukan di PPATK, dalam konteks apa, ya, kita kan hati-hati

melihatnya, ini ada aspek hukum terhadap peraturan ini ya. Nah ini yang *case*-nya, karena Peradi, Ikadin, melaporkan ini ke kita, bertanya, apa ini kapasitasnya, makanya hari ini saya tanya. Jadi kalau tadi parameternya hukum internasional, kita replikasi enggak, kalau belum, kan belum hukum positif kita, hati-hati disitunya. Oke lanjut, apalagi.

KEPALA PPATK:

Ya izin. Maksudnya bukan hukum internasional yang mulia, jadi ini adalah rekomendasi internasional yang dikeluarkan oleh *Financial Asian Task Force*, di mana Indonesia memang menjadi bagian dari *Financial Asian Task Force*.

KETUA RAPAT:

Sudah diratifikasi atau belum?

KEPALA PPATK:

Kalau itu rekomendasi tidak diratifikasi tapi.

KETUA RAPAT:

Kalau rekomendasi tidak diratifikasi bukan hukum.

KEPALA PPATK:

Ya.

KETUA RAPAT:

Harus paham itu.

KEPALA PPATK:

Ya, ya siap.

KETUA RAPAT:

Anda orang hukum atau.

KEPALA PPATK:

Iya saya orang hukum, siap.

KETUA RAPAT:

Ya kalau anda orang hukum paham maksud saya.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya kalau diratifikasi itu menjadi hukum positif kita, kalau acuannya rekomendasi itu sudah seolah-olah jadi hukum positif, bermasalah dengan hukum positif kita. Saya cuma mengingatkan hati-hati.

KEPALA PPATK:

Siap.

KETUA RAPAT:

Ya bikin aturan ya, yang seolah-olah itu mengatur, karena mereka punya aturan sendiri kan Undang-Undang Advokat. Nah kalau endak, usulan ke Komisi III akan kita revisi Undang-Undang Advokat, karena itu yang kurang lengkap, dalam artian bernegara yang baik kan harus jelas, kita atur, bikin catatan apa-apa yang berkaitan dengan Undang-Undang Notaris yang tidak cocok, dengan kerja-kerja PPATK, mana undang-undang ya, yang harus direvisi, karena tidak cocok dengan PPATK.

Kita ini sama sama, kita mitra ya, anda pihak pemerintah ya, kami pihak legislatif, kita bikin catatan itu ya, jangan bikin aturan yang di luar, yang nanti pada masalah hukum jadi lain, jadi enggak beres kalau nanti kita bernegara jadinya. Nah ini jadi *abuse*, *abuse*, *abuse* kan kayak gini nih sebenarnya, kenapa, dalam rapat anggaran ini saya ingatkan, karena penting, kita mau bikin apalagi ini dalam rangka PPATK jadi maksimal, anggarannya cukup atau tidak ini, nah ini yang harus kita buka. Ini saya mau kasih contoh saja, sebenarnya apalagi, apalagi, apalagi, agar Komisi III mengambil keputusan, tambahan ini untuk apa, kenapa kurang, ya kan, kita, apakah ini penurunan, kita harus lihat ini secara baik, ya.

Itu catatan-catatan, karena semua catatan itu kita juga kaget-kaget, PPATK bikin aturan, bikin peraturan, kalau peraturan sifatnya daripada internal, gitu loh, jangan aturan yang mengikat orang lain, kan repot, ya, biasanya peraturan sifatnya internal PPATK, tidak keluar untuk yang lain ya, ini catatan, oke.

Yang kedua, saya mengingatkan PPATK jangan bikin sesuatu yang apa ya, saya melihat tidak berdampak hukum yang baik gitu, kenapa, tolong PPATK mengemukakan pendapat, misalnya dalam kasus **Akra** ya, ini uangnya ke sini, uangnya ke sini, itu bisa jadi acuan penegak hukum enggak, bagian dari korupsi atau tidak, diminta enggak sama KPK atau Kabareskrim atau Kejaksaan data itu. Nah kalau tidak diminta, PPATK ngasih ya, ini gimana nih, yang ada PPATK seolah aliran ini, aliran ini, habis itu redup, seolah-olah PPATK ngomong kalau ada kasus *mem-backup*-nya. Tapi pada saat diam-diam ini tidak muncul ya. Ini ada catatan juga, gitu lho, misalnya dalam kasus hari ini Satgasus misalnya, aliran-aliran kemana contoh ya. Jangan nambah-nambahi politik yang kita bikin pening disini ya, kita harus lihat juga PPATK ini topuksinya apa ya, jangan memperlebar, memperlebar, memperlebar, ini juga kurang elok ya, mana yang pas, nah ini dicari juga formulanya. Saya bukan tidak setuju dengan apa yang terjadi, tapi apa yang pas, dalam rangka penegakan hukum misalnya, kenapa, karena aturan PPATK juga belum sempurna, kenapa, karena

banyak undang-undang yang belum maksimal, ya misalnya tentang perampasan aset dan macam macam kan belum, ya kalau itu ada semua sebagai alat KPK, PPATK mendongkrak itu kan.

Jadi semakin kita bisa lihat ke depan bagaimana ini, makanya anggaran ini adalah kita ingin lihat PPATK itu dia bisa lebih maksimal menjalankan tupoksinya. Jangan yang bukan tupoksinya nanti jadi lain, atau yang belum jelas ya hukum positifnya bikin aturan sendiri yang jadi bermasalah secara hukum. Itu catatan dari saya.

Bapak Ibu Anggota silakan, siapa yang mau, Pak Anca silakan.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Yang saya hormati Kepala PPATK, beserta dengan seluruh jajaran yang sama sama saya banggakan.

Tadi setelah saya mendengarkan paparan Kepala PPATK, singkat dan bisa dipahami dengan mudah, gampang dicermati dan cepat kami mencoba untuk, mencoba memberikan tanggapan beberapa poin-poin, meski sebenarnya pada hari ini bukan pembahasan poin 3-nya, tetapi ada gambar yang kami ingin ketahui, karena kita bicara tentang anggaran.

Pertama, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan salah satu misi utama berdirinya PPATK pada tahun 2010 ini. Nah di sini ada saya lihat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan aparat penegak hukum dengan target 150 orang sebesar 50,6 miliar. Kalau begini berarti 600 juta ya, kurang lebih begitu ya pembacaanya. Nah pertama yang saya ingin tanyakan adalah, Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang ini, aparat penegak hukum ini berapa kali dilakukan dengan anggaran yang kecil seperti itu, dengan target 150 orang dan aparat penegak hukum yang mana, apakah Polisi, Jaksa, Hakim, atau KPK yang menjadi target 150 orang. Kenapa saya bahas ini, karena kalau saya mencoba melihat niat baik kawan-kawan di PPATK dalam rangka penyelamatan keuangan ini, maka ini tentu kecil bagi menurut hitung-hitungan saya, tetapi bagaimana caranya bisa cukup, itu yang kami ingin ketahui siapa targetnya ini menjadi peserta pelatihannya.

Kemudian yang kedua, jejaring kerjasama luar negeri dengan target delapan laporan sebesar 4,5 miliar, maksudnya ini dengan target 8 laporan, apakah memang sudah diestimasi bahwa hal-hal yang ingin dikejar oleh kawan kawan PPATK ini ada di luar negeri dengan target 8 dari sekian banyaknya misalnya, yang ingin ditarget, yang ingin dikejar, misalnya hanya 8 menjadi targetnya, targetnya 8 ini, ini yang belum saya juga bisa pahami. Kenapa kita tanya seperti ini, supaya kita bisa paham, bahwa seberapa besar uang yang kita gunakan dalam rangka mengejar itu, dan seberapa besar kira-kira yang kita ingin selamatkan, supaya bisa berbanding Pak Ketua, kira-kira berbanding pengeluaran dan harapan untuk penyelamatan itu.

Kemudian yang ketiga adalah, dokumen hasil analisis dengan target 905 dengan angka 1,4 miliar. Kalau kita bahas bahas satu poin poin seperti ini, maka memang agak panjang ini tentu apa namanya pembahasannya, tetapi kami hanya butuh bayangan-bayangan dari kawan-kawan dari PPATK. Karena kita bicara tentang tadi adalah pencegahan dan pemberantasan, jadi ini sesuatu yang berhimpit langsung ini, pencegahan dan berantas. Membahas tentang pencucian uang, saya berharap begini seperti yang digambarkan tadi, PPATK lahir ini karena ada anggapan kita ini bahwa, banyak terjadi pencucian uang dari luar, ada orang bermain-main di bidang tertentu, yang mesti dipertanggungjawabkan keuangannya misalnya, jangan sampai dia melakukan pencucian uang, anggaphlah itu mafia tambang, anggaphlah itu mafia judi, anggaphlah itu mafia proyek-proyek negara yang menjadi targetnya, yang besar-besar, kalau hanya menyasar misalnya notaris-notaris kecil itu, seperti yang dibahas tadi Pak Ketua itu, menurut saya jangan lari ke situ dulu, menurut saya, kenapa. Karena yang dihadirkan PPATK ini untuk mencari hal yang sangat besar, jangan sampai yang sangat besar ini lepas, yang kecil-kecil ikan terinya didapat. Nah olehnya itu gagallah undang-undang ini hadir pada tahun 2010 yang dibuat ini, kira-kira begitu gambarannya menurut saya.

Olehnya itu yang saya gambarkan tadi itu kalau bisa Pak Kepala PPATK untuk dikejar di situnya, yang besar-besar, abaikan dulu yang kelas terinya, biarkan dia akan dikerjai oleh Kejaksaan yang kelas-kelas Kajari, Kepolisian di Polres, kan itu para aparat penegak hukum juga, berikan bocoran kepada mereka.

Kesemuanya ini menjadi kesimpulan dari saya, dari Fraksi Partai Golkar, saya setelah mendengarkan tadi usulan pagu-pagu indikatif 2023, 217, usulah tambahan 81 miliar dengan Nota Keuangan 2023, secara total 292 miliar, saya menganggap masih kecil dan dibandingkan dengan niat yang baik, kalau tadi yang saya sampaikan tadi itu dikejar yang besar-besar. Olehnya itu Fraksi Partai Golkar merasa setuju dan memberikan dukungan kepada PPATK dalam rangka pengajuan anggaran yang telah diajukan pada hari ini, untuk dilanjutkan.

Begitu Ketua, terima kasih saya kembalikan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masalah setuju nanti Pak, pandangan mini fraksi ya, ada pandangan mini fraksi ya, setuju tidak setuju Golkar nanti pandangan mini fraksi, nanti kalau pandangan mini fraksinya tidak setuju, kan jadi soal.

F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tapi saya punya hak sendiri, Pak Ketua menyatakan, saya bicara atas nama Supriansa saya setuju dengan apa yang disampaikan PPATK.

KETUA RAPAT:

Pribadi Pak, mini fraksi itu fraksi Pak ya, saya mengingatkan bahwa boleh setuju pribadi, nanti pandangan mini fraksi, apa mininya adalah itu pandangan fraksi Pak, hati-hati di situ ya.

Ya pertanyaan Pak Supriansa tadi sangat jelas Pak ya, pada intinya ya, kita hari ini bicara anggaran adalah merasionalisaikan kerja-kerja PPATK. Selanjutnya Pak Ichsan ada yang mau ditanya. Pak Nasir silakan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

PPATK yang saya hormati.

Terkait dengan rencana anggaran tahun 2023, memang seperti biasanya ada dua kegiatan utama yang dilakukan oleh PPATK, yaitu program dukungan manajemen dan program terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Nah pertanyaannya adalah soal pencucian uang ya, tindak pidana pencucian uang, belum lagi kalau kita misalnya menyampaikan soal terkait apa tindak lanjut dari institusi APH dengan rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK, dan tentu saja PPATK harus risau sebenarnya, ketika rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh institusi aparat penegak hukum, akhirnya institusi APH itu memilih dan memilah, mana rekomendasi yang mereka kerjakan atau laksanakan, dan mana rekomendasi yang mereka diamkan. Dan tentu saja siapa yang bisa memastikan dan mengawasi rekomendasi ini begitu. Nah karena itu ini juga harus menjadi kerisauan PPATK, apakah karena faktor regulasi ya, karena memang di negeri ini kalau tidak diatur di regulasi, enggak mau dijalankan ya, persoalan moral ya nanti dulu soal ya, soal moral dan habit dalam penyelenggara negara, ya itu nanti simpan aja dulu di satu tempat ya, regulasi enggak mengatur kira-kira begitu, tidak memberikan kewenangan, tidak memberikan otoritas ya, sehingga ya diamkan saja begitu kira-kira.

Nah karenanya soal rekomendasi ini juga perlu menurut saya menjadi kerisauan PPATK, kalau memang kita *concern* dan *commit* dengan upaya untuk tindak pidana pencucian uang.

Yang ketiga, ini terkait dengan rencana anggaran tahun 2023, dan tentu saja di tahun 2022 ini juga sudah dilaksanakan. Misalnya pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK ya, pemantauan lembaga, kemudian, fasilitas, dan pembinaan lembaga, kebijakan bidang ekonomi dan keuangan ya, dan seperti apa sebenarnya rekomendasi kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh PPATK. Apakah rekomendasi itu membuat benang kusut semakin kusut atau ingin mengurai benang kusut ya, apa namanya ekonomi dan keuangan di negeri ini, kan itu yang menjadi pertanyaan saya ya, dan bagaimana nasib kebijakan bidang ekonomi dan keuangan yang direkomendasikan oleh PPATK ya, meskipun tadi Ketua Doktor Desmond sudah menyampaikan, ini rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi namanya rekom ya bisa dilaksanakan dan bisa tidak, dan itu sebabnya kenapa dulu di awal awal DPR tahun 2004 itu namanya rekomendasi, lalu sekarang kesimpulan, supaya lebih mengikat ya, hasil rapat antara Komisi dengan Mitra Kerja. Dengan

dibuat kesimpulan diharapkan mengikat ya, mitra kerja terkait dengan apa yang disimpulkan.

Jadi begitu Kepala PPATK ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat sebelumnya bagaimana, apa nasib rekomendasi itu, kalau diabaikan atau kemudian tidak dilaksanakan untuk apa buat rekomendasi, habis-habisin anggaran saja kira-kira kan begitu ya. Nah jadi seberapa besar sebenarnya pengaruh rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan ya, yang dibuat oleh PPATK terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung ini gitu. Sehingga orang melihat bahwa ini sangat membantu ya, untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang kita alami saat ini, begitu juga dengan yang saya sampaikan tadi, pemantauan lembaga fasilitas dan pembinaan lembaga ya, kemudian juga soal penanganan perkara baik di apa, baik dalam program pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT, dan juga soal dalam pelaksanaan kerjasama, dan pemberdayaan kemitraan PPATK.

Nah dan yang paling terakhir yang saya sampaikan, kalau tidak salah tadi ada anggaran 0,6 ya, 0,6 miliar itu terkait dengan pendidikan terhadap APH soal pencucian uang, kalau saya tidak salah lihat tadi ya. Itu artinya bahwa memang sangat sedikit anggarannya ya, jadi di tahun 2021 kalau tidak salah waktu itu bahwa ada Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan aparat penegak hukum, dengan target output 150 orang sebesar 0,6 miliar gitu ya. Jadi kalau orang, sejak orang melihat ini, membaca ini, berarti enggak gawat-gawat kali pencucian uang di negeri ini, kan ini kira-kira begitu ya, aparatnya 150 orang, angkanya sekian miliar begitu, dan ini kan tentu untuk satu tahun anggaran. Orang melihat bahwa ini jangan-jangan memang enggak enggak serius-serius sekali tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini ya, atau memang alokasi anggarannya kenapa dialokasikan sebesar itu, kira-kira kan begitu pertanyaannya, apakah memang tidak cukup anggarannya atau memang alokasinya seperti itu, sehingga kemudian orang kemudian berkesimpulan, walaupun kesimpulannya sementara, bahwa pencucian uang di negeri ini tidak serius-serius amat ya, tidak besar-besar amat, dan tidak gawat-gawat amat gitu.

Oleh karena itu ini perlu penjelasan dari PPATK, dan tentu saja dalam konteks anggaran ketika pp, PPATK mengajukan rencana anggaran tahun 2023 dan tentu kami juga akan ingin ya, mengetahui bagaimana PPATK mengendus isu-isu yang selama ini berkeliaran di media sosial maupun di media *online*, terkait misalnya konsorsium judi ini, konsorsium judi itu, dan lain sebagainya, dan beberapa kali saya membaca di media *online*, Kepala PPATK juga memberikan respons soal ini. Jadi sangat wajar kalau kami kemudian menuntut, meminta, kepada PPATK terkait dengan isu-isu yang miring, isu-isu yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan tapi, tapi juga ada respons dari PPATK terkait dengan isu-isu tersebut.

Demikian Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir, saya pikir dua pertanyaan ini perlu dijawab Pak, Silakan.

KEPALA PPATK:

Baik terima kasih yang mulia Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu.

Terima kasih atas saran, arahan, kritik, maupun dukungan yang sudah disampaikan dan yang selama ini sudah diberikan kepada PPATK, terima kasih banyak Pak Supriansa, dalam banyak hal memang PPATK terus melakukan upaya perbaikan, melakukan upaya koreksi, serta mencoba merespons perkembangan UPPT yang ada, khususnya di era pemerintah ini.

Ini memang salah satu yang apa, *key point* sebagaimana bisa ditanyakan juga oleh apa Nasir, tadi adalah terkait dengan pendidikan, kita sudah punya institut financial inteligen, Indonesian financial, Indonesia Financial Intelligence Institute yang ada di Cimanggis, jadi itu berasrama dia. Jadi dia *residential*. Kita sudah bangun di sana, itu skala internasional, dan memang target apa, peserta pendidikannya tidak hanya dari sisi apgakkum-nya, tapi juga dari sisi penyedia jasa keuangan, termasuk profesi termasuk pihak pelapor secara keseluruhan, dan itu terus menerus dilakukan oleh PPATK. Nah apabila ditanyakan terkait dengan pembiayaan, pembiayaan terkait dengan kegiatan tersebut, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan kami, itu memang terkesan minimal, karena sifat dari, sifat dari pendidikan itu ada yang kerjasama dengan apa dengan pihak *counterpart* luar negeri, ada yang kemudian kita kerjasama langsung dengan apgakkum-nya, jadi Kepolisian dengan PPATK gabung bareng, kita melakukan Pendidikan bareng. Jadi kita tandem di antara, di antara PPATK dan teman-teman dari apgakkum dan di situ kita melakukan elaborasi terhadap apa kasus, apa, kita lakukan *case building*, dan ada juga di-*customize* pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing giat apgakkum. Yang yang kita lakukan adalah pendidikan spesifik terkait dengan TPPU, bukan terkait dengan penyidikannya, tapi penyidikan yang di-*customize* sesuai dengan kebutuhan APU PPT Indonesia. Karena seperti Kepolisian, seperti Kejaksaan, dan penegak hukum lain punya lembaga pendidikan sendiri sebenarnya, dalam teknis dari mereka *lex spesialisnya*, lalu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di APU PPT apa, di Indonesia.

Lalu kemudian terkait dengan jejaring kerjasama luar negeri. Ya PPATK selama ini selalu intens dengan PPATK luar negeri, kita membangun kasus bisa, bisa kita berangkat.

KETUA RAPAT:

Sebentar Mas, Pimpinan.

KEPALA PPATK:

Siap.

KETUA RAPAT:

Semuanya boleh, *output*-nya dulu, contoh *output*-nya dari semua pendidikan, *output*-nya apa, Pak Nasir tadi bilang, seolah, seolah ya, pencucian uang ini enggak-enggak, enggak, apa Pak Nasir bahasanya tuh, biasa-biasa aja.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Enggak, enggak gawat-gawat kali.

KETUA RAPAT:

Enggak, enggak, enggak kali katanya, kalau gambaran tadi seolah-olah ada kerja besar, *output*-nya itu gawat atau enggak gawat-gawat kali, kan ini bicara tentang institusi Pak, PPATK ini apa pun ngocehnya, kondisinya yang dipaparkan Pak Nasir tadi ya. Pencucian uangnya gawat, atau tidak gawat-gawat kali gitu loh. Jadi kalau bicara pendidikan, kerja internasional, kerja ini, kerja itu, Bapak menghambur-hamburkan anggaran, kalau *output*-nya tidak jelas, ngerti nggak. Yang ingin ditegaskan hari ini adalah, dengan anggaran sekian, tambahan sekian, karena kondisinya tidak baik-baik saja ya, berarti tidak perlu ada tambahan, kalau kondisinya tidak baik-baik saja, paparkan yang tidak baik-baik saja, Komisi III akan dukung, itu gitu lho, ya. Coba jelaskan ini *output*-nya.

KEPALA PPATK:

Ya, yang mulia saya masih menanggapi Pak Supriansa, saya akan ke sana, ya-ya siap. Ya *output*-nya yang kita dapatkan sekarang adalah penegakan hukum terkait dengan apa tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Jadi ini kan mematangkan kemampuan dari apgakkum, kemampuan mereka dalam upaya merespons HH dan HP.

KETUA RAPAT:

Oke rekomendasinya ke mana aja, karena kita *output*.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

PPATK melakukan pemantauan, penyidikan, dan macam *output*-nya pasti ada rekomendasi seperti Pak Nasir bilang ke mana, KPK, Kabareskrim, ke Kejaksaan, Densus atau apa. Saya ingin ada *output*-nya.

KEPALA PPATK:

Ya, jadi kalau bicara *output* terkait dengan apa lembaga pendidikan tadi, jadi penyidikannya kita harapkan akan meningkatkan faktanya memang sudah meningkat. Nah rekomendasi PPATK bisa diperoleh dari dua apa Ketua. Jadi bisa dari rekomendasi berdasarkan hasil riset, kita memiliki yang namanya *national risk assessment*, rekomendasi itulah yang kemudian dipakai oleh industri perbankan untuk menerapkan yang namanya *riskbased approach*, kemudian rekomendasi itu pula yang dipakai oleh KPK, oleh Kejaksaan, oleh Kepolisian untuk menentukan tindak

pidana apa yang mereka harus fokus terkait dengan TPPU, karena petanya kita, kita punya.

KETUA RAPAT:

Kenyataannya hasil yang anda umumkan tidak pernah dibicarakan oleh KPK, bahwa ini hasil dari penyidikan PPATK.

KEPALA PPATK:

Ya memang tidak.

KETUA RAPAT:

Jangan. Anda klaim bahwa itu diperhatikan, itu kan klaim sepihak dari anda, jangan ngaranglah gitu lho, jangan mengarang.

KEPALA PPATK:

Ya, ya.

KETUA RAPAT:

Ya, atau kita baru rapat dengan KPK, sebelum anda di sini, ya atau saya tanyakan ke anggaran, jujur aja.

KEPALA PPATK:

Ya.

KETUA RAPAT:

Karena output-nya apa bagi bangsa ini gitu lo, anggaran kurang atau tidak kita akan *support* maksimal, ngerti enggak, jangan mengarang seolah-olah kerjaan kalian beres gitu lo waktu, berjalan, berjalan, pertanyaan Pak Nasir penting. Kondisi pencucian uang kita ini gawat atau biasa-biasa saja, kalau gawat, kalian kurang apa, kita bicara di sini, kalau enggak gawat kita juga bisa terima, tapi jangan ngarang, seolah-olah kalau udah bekerja maksimal, tapi *statement* anda cukup menarik, bahwa itu menjadi acuan Kejaksaan, jadi acuan KPK, jadi acuan Kepolisian, nanti akan kita uji ini, kalau enggak benar, berarti anda ngarang gitu lho, paham enggak.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

Kita enggak mau ya, kalian mengarang, objektif aja kita ini mitra gitu lho, bukan kami maksudnya mengkritik atau apa, karena penegakan hukum ujungnya adalah, kalau semuanya berjalan sinergis, semuanya akan baik, semua akan semakin

penegakan hukum, semuanya akan terukur, tapi kalau PPATK bikin ini, KPK bikin ini, kan kenyataannya begitu kan, Kejaksaan bikin ini, enggak jauh beda ya, secara IT kalian lebih baik daripada KPK, atau lebih baik daripada Kejaksaan Agung, kita tahu, karena sumber dananya dari kami, sampai hari ini penyidikan yang paling baik dalam konteks IT Kejaksaan misalnya, tidak baik-baik saja di PPATK, karena semuanya kan kami melihat, satuan-satuan yang ada.

Jadi tolong gitu, kondisi kita hari ini ya, misalnya saya ulang, apakah rekomendasi PPATK, memang diperhatikan oleh penegak hukum, jangankan urusan itu, urusan disclaimer-disclaimer di BPK itu kadang-kadang tidak diperhatikan, kami kritik itu, karena itu dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan kan begitu, tapi apa yang kalian rekomendasikan itu jadi dasar enggak, dalam proses penyidikan, ini bicara tentang persoalan ekonomi kan, gitu lho.

KEPALA PPATK:

Ya.

KETUA RAPAT:

Jangan sampai kita apa, seolah-olah rapat-rapatan saja, kita akan cek ini karena banyak hal hari ini beredar macam-macam, ada judi seperti Pak Nasir bilang, ada ini, ada ini, mana posisi PPATK ya, atau Bapak Ibu sekalian ke depan kita minta ya, laporan dari PPATK, mana hasil pantauan mereka terhadap situasi ini, mitra boleh dong kami Komisi III minta data dari kalian, untuk itu kan.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Interupsi sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Interupsi apa Pak?

F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya interupsi, dipersilakan atau tidak?

KETUA RAPAT:

Apa interupsinya untuk apa?

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Interupsi saya, saya ini bertanya, saya minta *feet back* jawabannya, saya mau mendengarkan, Pimpinan jangan dulu diperpanjang.

KETUA RAPAT:

Apa?

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Jangan dulu diperpanjang.

KETUA RAPAT:

Jangan diperpanjang?

F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sama mau mendengar dulu, apa jawaban terhadap pertanyaan saya.

KETUA RAPAT:

Bukan saya ini cuma.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Bapak mengarahkan saja, karena kalau dibiarkan tidak selesai selesai ini jawabannya.

KETUA RAPAT:

Saya ingin ya, anggaran ini ya berbasis kinerja dan ada parameternya.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya tapi saya punya pertanyaan dan saya butuh jawabannya, dan kalau saya sambungkan dengan apa yang Bapak tanggapi, berbeda dengan apa yang saya harapkan.

KETUA RAPAT:

Nanti minta disini Pak, anda harus tahu tentang tujuan anggaran Pak ya.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Bukan persoalan tujuan anggaran, ada.

KETUA RAPAT:

Saya tidak izin kan anda bicara, sebelum saya selesaikan jawaban ini, nanti anda boleh jawab punya Pak Supriansa ya. Saya cuma ingin rekomendasi anda tuh diperhatikan enggak oleh penegak hukum, saya jawaban ini aja kalau anda bilang diperhatikan nanti saya cek ya, dalam kasus apa silakan.

KEPALA PPATK:

Ya sangat diperhatikan yang mulia. Jadi tidak ada ngarang-ngarang di sini saya tidak dalam kapasitas ngarang sebagai kepala PPATK di sini, ya contoh misalnya, yang mulia silakan saja tanya KPK, ya karena memang kita ya, katakanlah kita memang dididik, diasuh, dilindungi oleh teman-teman Komisi, oleh beliau-beliau Komisi III, contohnya, PPATK selama tahun 2022 saja sudah menyampaikan 59, 59 hasil analisis dan sebelum pemeriksaan, lalu PPATK merekomendasikan dalam *national risk assessment*-nya, agar KPK membuat yang namanya *sectoral risk assessment*, mereka bikin, mereka bikin dengan PPATK, mereka bikin kita bikin bersama, PPATK merekomendasikan kepada Kumham untuk membuat SRA mereka bikin, PPATK merekomendasikan kepada kepolisian untuk membuat SRA mereka bikin, ke PPATK merekomendasikan kepada kementerian keuangan mereka bikin, dalam rangka menghadapi **LPATL MER** kemarin kita merekomendasikan kepada masing-masing instansi untuk membikin sesuatu, mereka bikin semua, mereka bikin semua. Tapi kalau nanti saya akan menjawab satu persatu saya bisa buktikan, enggak mungkin saya ngarang, saya punya datanya semua, nanti akan saya masuk kepada kasus judi *online* kalau diperkirakan, saya bahkan bisa menyatakan jumlahnya siapa yang saya bisa, secara tertutup tapi.

Anggota Komisi:

Sedikit Ketua, sedikit.

KEPALA PPATK:

Jadi saya tidak dalam konsep mengarang yang mulia, serius, saya enggak ngarang, enggak pernah ngarang saya di sini.

KETUA RAPAT:

Ini akan saya crosscheck Pak.

KEPALA PPATK:

Monggo silakan.

KETUA RAPAT:

Ada sudah sebut semuanya ya, ada analisisnya berdasarkan dari rekomendasi anda, kita tinggal cek kok ya, kita akan cek ya, saya terima ini, karena saya belum, belum pernah terbicarakan ini, di rapat kami dengan mitra yang lain, kita berharap kalau ini betul, betul ada proses sinergi yang baik.

KEPALA PPATK:

Sangat baik.

KETUA RAPAT:

Ya.

KEPALA PPATK:

Sangat baik ya mulia.

KETUA RAPAT:

Kalau itu sangat baik.

KEPALA PPATK:

Luar biasa baik.

KETUA RAPAT:

Saya enggak mau ada klaim klaim ujung-ujungnya, enggak.

KEPALA PPATK:

Enggak, boleh.

KETUA RAPAT:

Bukan berarti saya tidak percaya anda.

KEPALA PPATK:

Ya.

KETUA RAPAT:

Kan ini kan kita dalam rangka untuk kepentingan bangsa kita.

KEPALA PPATK:

Siap.

KETUA RAPAT:

Kenapa PPATK ada, kenapa KPK ada, kenapa ada Polri, Jaksa, segala macam, ini kan harusnya satu kesatuan dalam proses penegakan hukum, ada masing-masing wilayah yang bekerja.

KEPALA PPATK:

Siap.

KETUA RAPAT:

Nah makanya saya senang, rekomendasi-rekomendasi kalau diperhatikan, ini luar biasa kenapa, ada rekomendasi-rekomendasi yang tidak diperhatikan, misalnya

rekomendasi Komnas HAM ya, banyak yang tidak diperhatikan, baik di TNI maupun Polri, makanya saya harus check ini dalam konteks masih penting enggak PPATK dalam proses bernegara kan itu, ini yang harus kita rapatkan dalam konteks anggaran. Jangan sampai kita susun anggaran, ternyata tidak baik-baik saja kondisi pencucian uang, berarti anggaran kalian kan kecil, kalau kecil tambahan ini juga jadi kecil, berarti belum cocok. Inilah yang saya bilang kenapa, belum tentu anggaran ini yang diusulkan kita setuju begitu saja ya, kalau kita mau memperkuat PPATK, kalau sekadarnya bahwa kalian usul anggaran kami setuju, tapi kita tidak tahu kekurangan kalian, kan percuma ya. Kalian sendiri yang tahu, kami tidak tahu, asal-asalan kami setuju, setuju, ternyata kenyataannya tidak baik-baik saja, berarti anggarannya cukup atau tidak.

Dengan anggaran yang sekian ini, dibandingkan dengan mitra yang lain, rendah kali ya, itu, periodenya itu, ya ini di bawah. Kalau yang lain kan ada 1 triliun, inikan kecil kali gitu, maka *output*-nya yang penting, *output*-nya sepenting apa? bagi mitra yang lain kan begitu Pak. Kalau *output*-nya penting bagi mitra yang lain, berarti kan ini harus naik anggaran, tambahan anggaran, ini yang harus kita rasionalkan, kalau enggak tahun ini tahun depan, untuk semakin memperkuat PPATK. Kenapa saya harus detail tentang ini.

Ini catatan, untuk itu silakan menjawab punya Pak Supriansa, beliau tidak puas dengan, dengan tujuan saya ini, silakan.

KEPALA PPATK:

Ya terima kasih yang mulia.

Sebagai contoh saja izinkan saya sedikit saja peran PPATK terkait dengan penerimaan negara, contohnya, dalam kerangka membantu Direktorat Jenderal Pajak saja PPATK bisa kontribusi lebih dari 15 triliun, untuk membantu menyerahkan data kepada teman-teman DJP di Kementerian Keuangan, bisa dikonfirmasi.

Terus kemudian terkait dengan beberapa kasus, yang mulia izinkan, kita udah berapa kali sampaikan di sini bahwa, setiap hari kita berkomunikasi dengan teman-teman KPK, setiap hari kita berkomunikasi dengan teman-teman Kepolisian, dengan teman-teman Kejaksaan, hampir dalam setiap kasus yang mulia bisa tanyakan saja kepada beliau-beliau, hanya memang kemungkinan apabila, karena ini kan sifatnya informasi inteligen ya yang mulia, pada saat kita bicarakan kepada teman-teman penyidik, kemungkinan mereka, kita juga melarang mereka untuk mengungkapkan, bahwa itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK, itu memang sudah seperti itu *patern*-nya di dunia. Jadi mereka jalankan PPATK *financial intelligence unit*, jadi kita berada di bawah itu.

KETUA RAPAT:

Disini kan ada rapat terbuka, ada yang rapat tertutup.

KEPALA PPATK:

Siap yang mulia.

KETUA RAPAT:

Ada yang rapat tertutup.

KEPALA PPATK:

Ya siap.

KETUA RAPAT:

Yang tertutup kira rahasia gitu loh, ya.

KEPALA PPATK:

Siap. Intinya, intinya terima kasih banyak yang mulia Pimpinan Sidang, bahwa apa, sekali lagi dengan bantuan, dengan dukungan dari Komisi III kita terus berupaya maksimal, terkait membantu aparat penegak hukum, terkait dengan APUPPT me apa, memperjelas aliran keuangan yang ada di kasus yang mereka sedang apa berikan kepada PPATK.

Lalu terkait dengan, terkait dengan ya, Pak Supriansa ya.

Jadi apabila kita melihat, apa yang kita lakukan sekarang khususnya terkait dengan, ya, jadi kita, mohon maaf ini tadi ada agak *missed*, ya. Jadi terkait dengan upaya pendidikan yang dilakukan oleh, pendidikan yang dilakukan di apa, yang 150 orang tadi, ini memang kita *customize*, hanya memang kita tidak bisa secara keseluruhan. Jadi kita sudah konsultasi terus dengan apa Bapak-Bapak di, Bapak dan Ibu Ibu di Komisi III memang tidak semua, karena ini masif sekali kan penegak hukum, jadi tidak semua bisa kita layani untuk datang ke pusdiklat kita, sehingga memang sangat terbatas, tapi itu sangat efektif dari kontak kita. Jadi *a long way* setiap saat, nah kita lihat perkembangannya, khususnya hari ini kita terus apa bantu kepada teman-teman apgakkum, baik yang sudah melakukan pendidikan ataupun yang kemudian mereka memang *customize* sendiri pendidikan di instansinya masing-masing, dan kita tidak dalam konteks, dalam konteks pendidikan kita tidak memungut biaya dari beliau-beliau di di penegak hukum lain, Insya Allah itu bisa apa terus kita lakukan.

Lalu terkait dengan Pak Nasir, beberapa tadi sudah digabung jawabannya, yang kami jawab kepada Pak Supriansa. Nah memang apabila kita melihat terkait dengan isu-isu yang sekarang, PPATK terus intensif bekerja sama dengan penegak hukum lain, ya khususnya yang terkait, misalnya apabila kita bicara mengenai apa kasus-kasus yang kita, ya yang sekarang terkait dengan perjudian, dan segala macam itu, kita terus bekerja sama dengan penegak hukum, dan sekali lagi kita melakukan analisis, kemudian melakukan apa diskusi dengan teman-teman itu dan kemudian menyampaikan hasil analisis kepada apa penegak hukum terkait, kepada Kepolisian, kepada Kejaksaan, dan bahkan kepada kasus-kasus terakhir itu intensif, pembekuan, penyitaan apa, pengejaran terhadap orang itu karena informasi yang diperoleh dari PPATK, itu yang ada sekarang ini, yang dilakukan oleh penegak hukum sekarang ini.

Lalu kemudian terkait dengan, lalu kemudian terkait dengan izin saya.

KETUA RAPAT:

Berkaitan pertanyaan Pak Nasir ya Pak?

KEPALA PPATK:

Ya, ya.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir.

PPATK:

Sorry, sorry catatannya.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Begini Ketua, terima kasih Ketua.

Menyangkut dengan rekomendasi-rekomendasi, tujuan kita bernegara kan itu agar negara ini lebih baik Ketua, Mungkin PPATK perlu bekerjasama dengan Komisi III, terkait dengan rekomendasi yang disampaikan. Jadi rekomendasi ini disampaikan dengan harapan, kalau rekomendasi ini dilaksanakan, maka akan tercipta situasi seperti ini, kan begitu. Sehingga kemudian kita juga tahu, bahwa rekomendasi itu diharapkan agar ada situasi yang seperti ini begitu. Nah jadi harapannya, rekomendasi-rekomendasi itu dengan kajian-kajian yang dibuat oleh PPATK itu dalam konteks penegakan hukum, lebih khusus lagi dalam tindak pidana pencucian uang itu, bisa kita juga sama-sama tahu. Sehingga kita bisa ingatkan juga, institusi APH ya, yang terkait dengan melaksanakan rekomendasi PPATK itu, sehingga ada konsistensi, untuk menjalankan rekomendasi itu, jangan sesaat saja, setelah itu tidak dijalankan lagi, begitu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KEPALA PPATK:

Ya terima kasih Pak Nasir.

Ini beberapa kali memang kita sampaikan contohnya seperti kemarin, setelah kita menghadapi apa tim, tim dari terkait dengan upaya Indonesia menjadi anggota dari apa, FATF. Jadi kita menyampaikan rekomendasi kepada apa pemerintah, jadi semua Tim FATF datang ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu anggota FATF. Jadi kita juga sampaikan ke Komisi III, terkait dengan temuannya, terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan, dan terkait dengan apa rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah seluruh *stakeholder* apa yang harus

kita lakukan termasuk bantuan dari Bapak-Bapak dari, termasuk kepada Ketua DPR kita, Ketua Komisi III kita sampaikan juga, dan itu terus kita diskusikan. Harapannya Indonesia bisa di apa dijadikan, di Februari tahun depan, Indonesia menjadi bisa dijadikan sebagai anggota *Financial Action Task Force*.

Jadi kita berharap. Ya.

KETUA RAPAT:

Saya cek Sekretariat, mungkin ada hal yang harus di klarifikasi, Komisi III belum pernah menerima rekomendasi dari PPATK, ada Kepala Sekretariat di sini. Jadi kalau anda bilang bahwa Komisi III, ada rekomendasi PPATK yang seperti anda bilang, sampai hari ini belum ada, ya. Apa yang diminta Pak Nasir sederhana aja, apa yang dipaparkan ya, kalau itu dalam rangka kami memperkuat PPATK, dalam rangka kami memperkuat institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kami minta rekomendasi itu agar pada saat rapat kami dengan KPK, kami ingatkan ada rekomendasi dari PPATK. Kalau itu jadi rahasia, kita akan rapat tertutup dengan KPK gitu loh, begitu juga dengan Kejaksaan, dan Kepolisian, tapi sampai hari ini yang diminta Pak Nasir kan sederhana, catatan-catatan rekomendasi ke mitra-mitra kami yang lain, kami juga minta, dalam rangka memperkuat PPATK, paham Mas.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

Nah itu, ya. Kalau hari ini anda bilang sudah, sampai hari ini sepertinya belum, makanya kami minta, begitu ya Pak Nasir, Pak Nasir minta kan, gitu.

KEPALA PPATK:

Siapa yang mulia, apabila dirasakan itu ya apa yang kami lakukan masih belum sesuai dengan apa yang dikehendaki akan kami perbaiki, tapi yang jelas untuk kemarin menjadi anggota FATF, hasil dari diskusi kita dengan Tim FATF yang sebulan ada Indonesia, kita sampaikan kepada Komisi III, termasuk Ketua DPR. Ya mohon maaf, kita bisa sampaikan lagi, ya siap, mohon maaf, ya siap ya.

KETUA RAPAT:

Ada lagi Pak Nasir.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Pimpinan. Satu putaran Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Hinch silakan.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Terima kasih Pimpinan.
Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
PPATK dan seluruh pejabat utama yang hadir.

Saya lanjutkan lagi pendalaman yang disampaikan Pimpinan dan juga 2 rekan saya sebelumnya. Tentu kalau kita bicara anggaran, kita bicara pada bagaimana membuat lembaga ini menjadi kuat, saya membuat kata-katanya mewibawakan PPATK melalui rekomendasinya, begitu, sehingga nanti baru keluar angkanya, dan tentulah PPATK ini kita siapkan dalam konteks bernegara, memperkuat sistem kita. Nah kata kunci di PPATK bagi saya adalah transaksi keuangannya, karena itulah apa produk baru dari sebuah sistem yang ada di dunia ini, dan karena itu sejak pasca reformasi, barulah lahir sebagai bagian dari kita untuk memperkuat. Nah berangkat dari situ nanti baru kita bicara anggaran yang dimintakan ini.

Kami di Komisi III pasti selalu bertanya *output*-nya, sehingga kita tahu, kalau *output*-nya sebesar, kecil, sedang, atau besar, maka itulah anggarannya nanti berbanding lurus dengan anggaran yang dibutuhkan. Berangkat dari soal itu maka, permintaan tambahan anggaran misalnya, yang 75 miliar itu ya, kalau misalnya kita perlihatkan penjelasan di halaman 18 ya, penjelasan penggunaan tambahan anggaran, misal, peningkatan kualitas IT, biayanya 47 miliar, karena ini transaksi keuangan, pasti pakai elektronik, pasti pakai teknologi paling maju dan canggih masuk akal ini, permintaan ini.

Pertanyaannya adalah saya baca pelan-pelan, apa kira-kira *output*-nya, hanya dikatakan, penggunaan HCI, *Hyper Convergent Infrastructure* ini, akan meningkatkan kinerja layanan sistem aplikasi yang digunakan PPATK dalam hal kecepatan akses, proses pengolahan data, serta keamanan data dan informasi yang dikelola oleh PPATK, teknis, teknologi. Tapi kalau ditanyakan di Komisi III, apakah dengan teknologi secanggih ini, rekomendasi kita menjadi sangat akurat dan kemudian dipakai oleh institusi akan menerima ini tadi, kan begitu, karena itu saya mengamini apa yang disampaikan Pimpinan, dan juga Bung Nasir Djamil tadi, pada kualitas itu tadi.

Nah jadi pertanyaannya adalah, apakah IT yang kemarin yang sekarang ini sudah tidak mampu lagi atau tidak maksimal lagi men-*support* kinerja PPATK, sehingga harus diganti, atau di-upgrade. Karena itu mungkin perlu ada audit terhadap barang atau sistem atau teknologi atau aplikasi yang dipakai itu, berapa angkanya dan yang kemarin itu berapa, tuh kita buang saja, diganti yang baru atau seperti apa. Nah penjelasan seperti itu kan tentu menjadi penting, kata kunci penambahan firewall dan authenticator ini penting sekali memang, kalau kita nanti PPATK diserang *hacker* ya selesai, maka perlulah teknologi tinggi. Nah karena itu jangan-jangan angka ini menjadi terlalu kecil dibandingkan harapan yang kita inginkan tadi, oke. Seandainya kami tidak pernah tahu apa yang kemudian menjadi *output* kita, kan enggak bisa kita baca ini yang keinginan teman-teman, karena semua datanya kualitatif aja, mungkin dalam keadaan tertentu, seperti teknologi ini bisa quantity, tadi kami bicara juga dengan teknologi yang dibutuhkan oleh KPK, besar sekali, ratusan miliar juga, benar karena sistem menjadi harus ter-*upgrade* menjadi makin bagus, makin bagus dan

makin bagus, mungkin saja agar apa, IT kita yang sudah sekian tahun, yang memang sudah butuh waktu untuk di-upgrade.

Jadi itu poin pertama, poin kedua misalnya peningkatan kapabilitas pihak pelapor dan aparat penegak hukum sebesar 1,1 miliar, kecil memang. Tapi kalau dibaca lagi manfaatnya, hanya diharapkan meningkatkan kualitas pelaporan, akhirnya sekolahnya, yang tadi disampaikan oleh teman-teman, tidak, kita mau PPATK ini yang berwibawa, kalau bahasa kami di Medan, ya kira kira begini nih ya. Jangan sampai PPATK ini adapun dia tak ganjil, tak adapun dia tak genap ya, jadi ganjil genap toh, padahal kita mau ada dia hebat berwibawa dan kalau enggak ada menjadi tidak ada apa-apanya, jadi harus ada, begitu, harus ada gitu Pak.

Nah jadi akhirnya kita ingin melihat *output*-nya, saya ambil contoh ini, kalau tadi disampaikan, semuanya yang kami berikan itu diikuti, saya ambil contoh tahun ini PPATK mengumumkan, ada transaksi mencurigakan ratusan triliun, triliun, untuk narkoba dan menurut teman-teman sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum, termasuk BNN. Kami konfirmasi di sini, dia mengatakan tidak akurat. Nah kalau begitu pertanyaan tadi menjadi menarik, Pak Hinca itu cuman transaksi begitu saja, kami cek, tidak bisa di-*follow up*, itu kata BNN di sini, nah itu yang besar. Sekarang yang kecil, lihatlah pendidikan, saya ikuti memang ada beberapa petugas atau aparatur Polri di bagian krimsus ikut pelatihan kita, mendapat sertifikat, keren sekali itu, dan bagus sekali, oke. Nah tiba-tiba datang ke kita di dapil, ditanya, Bang aku mau sekolah, aku pakai ini sertifikat dari PPATK, enggak laku itu katanya.

Nah kalau kita ngomongin pada pendidikannya gimana itu Pak, karena itu perlu diberitahukan konfirmasinya, sehingga pihak Polri, Mabes Polri ini setiap yang mendapatkan pendidikan dari PPATK, mengenai TPPU, pencucian uang, layaknya lah dia diteruskan sekolahnya untuk agar dia naik kariernya, ini kecil-kecil saja Pak.

Nah jadi kalau teman-teman menganggap itu logis Pak, karena itu kita pengin lagi pakai bahasa Medan ini, kita mau PPATK ini sangar, sangar dia pada rekomendasinya, bukan sekadar pelengkap penderita.

Terakhir, untuk melengkapi ini. Baru saja kira-kira berita hari ini, baru naik berita hari ini, apa yang terjadi, PPATK memantau bersama OJK, 608 koma sekian miliar judi *online* yang menggunakan transaksi perbankan, uangnya ada di Thailand, Kamboja, Filipina, bahkan pergi ke negara-negara *tax haven*, jumlahnya ratusan triliun per tahun, kita ingin di Komisi III ini, rekomendasi teman-teman, dengan teknologi yang canggih ini untuk bisa dibawa pulang ke republik ini, kalau itu yang terjadi, ya kita naikin harga anggarannya gitu, itu yang saya tangkap dari semangat kami di Komisi III ini, untuk memastikan PPATK ini menjadi sangar mencari itu. Nah kami sudah laporkan ini, apa berapa, 8.693 *customer information file*, kan gitu, sudah diumumkan ini OJK sudah *follow up* dan seterusnya, angkanya segitu per tahun, kalau PPATK fokus di sini, itu berarti APBN kita, anggaran kita, negara kita menjadi kuat, dan kehadiran PPATK, tentu seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi ada pun dia tak ganjil, tak adapun tak genap, dia harus hadir dan bisa menjadi kekuatan untuk aparat penegak hukum kita yang kita inginkan bersama.

Jadi dari situ saya ingin mengatakan, apakah anggaran yang Bapak susun, permintaan tambahan 75 miliar itu, termasuk menjawab pertanyaan keraguan kami itu

Pak, kalau pertanyaan kami yang rada ragu itu bisa Bapak jawab, kami yakinkan Pak Hincha bahwa hasil-hasil kerja kami, rekomendasi kami valid, dan kemudian diikuti para yang menerima laporan itu, saya kira Pimpinan, saya mendukung anggaran ini untuk dinaikkan, jika perlu ditambah lagi, karena kita butuh PPATK yang kita harapkan itu, itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, menarik, langsung jawab aja.

KEPALA PPATK:

Terima kasih Pak Hincha, terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini, segala perubahan setiap kita rapat, selalu mendukung. Memang terkait dengan penambahan anggaran yang kami lakukan kemarin, yang kami sampaikan kemarin itu sudah melalui perhitungan yang panjang, terkait dengan meningkatkan apa, kualitas PPATK terkait dengan misalnya apakah yang narkotika tadi itu akurat atau tidak, selama ini memang PPATK selalu melakukan koordinasi dengan teman teman BNN, teman-teman penegak hukum lainnya, saya juga beberapa kali ke BNN untuk mendiskusikan terkait dengan data, bagaimana kita *me-follow up*-nya, dan terkait dengan narkotika, dia menjadi salah satu tindak pidana, atau dalam konteks *hit map*-nya ya, kita punya ada peta risiko, dia termasuk salah satu tindak pidana asal yang paling berisiko di Indonesia, tindak pidana narkotika, dan kemudian tindak pidana korupsi dan berikutnya ada lainnya, itu ada di dalam *national risk assessment* kita, yang kita bikin bersama dengan apa, dengan teman-teman BNN juga.

Jadi kita membuat berdasarkan rekomendasi internasional, Indonesia harus membuat yang namanya peta risiko nasional, dan korupsi, serta narkotika memang yang paling tinggi, dan setiap kita melakukan analisis terkait dengan transaksi narkotika, itu tidak hanya proaktif, tetapi juga ada reaktif, jadi teman-teman BNN menanyakan kepada PPATK, selalu kita berkoordinasi apa, terkait dengan kebenaran dari informasi atau apakah itu sudah ditandatangani oleh teman-teman BNN atau belum, atau ini merupakan sebuah data yang baru, dan kita *crosscheck* dengan validitas data dari BNN dan *Alhamdulillah* yang memang peta risikonya menggambarkan yang namanya narkotika dan korupsi itu merupakan tindak pidana yang paling berisiko dil, berdasarkan peta *hit map*-nya Pak Hinca. Jadi itu yang apa kami lakukan dan kita tuangkan itu di dalam *national risk assessment* Indonesia, jadi peta risiko nasional Indonesia sudah ada, berdasarkan rekomendasi internasional.

Dan berikutnya terkait dengan apa dengan apa yang disampaikan oleh OJK, kita juga bekerja sama dengan teman-teman OJK terkait dengan apa, ya penggunaan teknologi canggih, kemudian adanya mohon maaf, tadi adanya ya *upgrade* terkait dengan teknologi informasi yang PPATK punya, itu sudah kami lakukan, dan insya Allah pada saat yang apa, pada saat yang beberapa kali kami sudah sampaikan di dalam forum terhormat ini, bahwa PPATK sudah selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari penegak hukum lainnya, dan kasus-kasus yang kami sampaikan, itu mencerminkan, eh tercermin di dalam *hit map* peta risiko di apa, di *national risk assessment* kita, begitu Pak Hincha.

Mudah-mudahan dengan dukungan dari Komisi III yang terus menerus diberikan kepada PPATK, khususnya itu akan terus bisa apa mendukung kinerja PPATK, tapi sekali lagi PPATK mengajukan anggaran sesuai dengan apa, dengan saran dari Bapak-Bapak juga, kita, terakhir kita mengajukan anggaran lebih besar dari yang kita mohonkan, tapi kemudian Bapak-Bapak yang mulia apa, memberikan apa nasihat, memberikan pertimbangan lain, sehingga yang kami terima adalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin dari situ kita bisa melihat bahwa, dengan PPATK selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dari penegak hukum lainnya, dan, dan insyaallah kami selalu akan berkoordinasi dengan beliau-beliau di penegak hukumnya dan

Nah jadi ini tidak semata-mata temuan PPATK Bapak, jadi kita konsultasi dengan KPK, kita konsultasi dengan BNN, kita kemudian konsultasi juga dengan aparat penegak hukum lainnya, dan ketemulah kasus-kasus itu kita bangun bersama, tapi kalau kemudian sinyalemen BNN sendiri bahwa angkanya tidak segitu banyak, itu kita, kita tidak tahu perhitungannya. Memang fakta bahwa tindak pidana narkoba dan korupsi itu tertinggi, karena kita diskusikan barang-barang, dan itu ada di dalam peta risiko nasional Indonesia, itu sudah, sudah ter-publish internasional, itu kita bikin bersama dengan teman-teman penyidik yang terkait. Jadi tidak serta-merta PPATK mengeluarkan data sesuai dengan apa yang PPATK apa, ketahui dan PPATK yakini, tapi lebih kepada ada diskusi apa, dengan teman-teman penegak hukum yang terkait, yang pengampu dari tindak pidana tersebut. Mungkin itu bapak, apabila ada yang kurang, bisa saya.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Sedikit aja, karena ini *simple* aja tadi.

KEPALA PPATK:

Ya.

F-DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Karena saya prihatin sekali mas.

KEPALA PPATK:

Ya.

F-DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Dengan teman-teman Kepolisian atau anak-anak muda yang ikut pelatihan di kita.

KEPALA PPATK:

O ya ya ya.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Kenapa itu enggak bisa mereka pakai sebagai sesuatu yang berharga, apakah PPATK yang tidak komunikatif dengan Pimpinan Polri, harusnya kan dapat penghargaan lah begitu ya, supaya kita ini benar gitu, apa yang salah di situ.

KEPALA PPATK:

Ya, ya, saya-saya tidak tahu ya, *angel*-nya apa Bang, apa Pak Hinca bicara dari mana, tapi yang jelas hampir tiap minggu kita memberikan itu, dan itu buat sekolah misalnya, atau buat kemudian promosi atau buat kemudian membuktikan bahwa, nah peran dari teman-teman penyidik itu memang sangat signifikan di dalam membangun satu kasus tertentu gitu, jadi selalu kita memberikan rekomendasi itu, dan itu, *its works*, dan itu bagi bagi mereka memiliki nilai-nilai tersendiri untuk mem-*promote* prestasinya, dan hampir tiap, hampir tiap ini, apa ya, katakanlah tiap minggu.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Sebentar Pimpinan.

KEPALA PPATK:

Siap.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Itu kan bagus.

KEPALA PPATK:

Ya.

F-DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Tapi, ini kan tadi ngomongin tadi pertanyaan Pimpinan tadi, kualitasnya tadi, kalau yang menerima itu cuma kertas saja dipakainya, padahal itu dianggap menjadi karir yang bagus tidak diterima oleh institusi Polri ya, ada yang salah di situ, poin saya di situ. Nah untuk komunikasi bahwa harusnya, kalau udah ikut sekolah kita, ya atau pendidikan kita harus ada mendapatkan *value* untuk itu tadi, ini catatan saja, terima kasih Pimpinan.

KEPALA PPATK:

Itu lebih kepada slotnya kali ya Pak Hinca.

KETUA RAPAT:

Intinya.

KEPALA PPATK:

Iya.

KETUA RAPAT:

Disemua sektoral itu jelas masih ada, egoisme sektoral ini kan, PPATK, ya harusnya kan sinergis ya, harusnya sinergis. Nah ini catatan Pak Hinca, kawan-kawan semua, bahwa anggaran pendidikan-pendidikan ini kan perlu kita sinergikan tuh ya, terkoordinasi agar saling menghargai ya, harus kita konsul juga nanti dari aspek anggarannya, internal mereka mendidik apa ya, kalau mereka misalnya, apa Sespimti, ada Lemhanas segala macam-macam di Kepolisian gitu, tapi ini kan jadi satu jenjang yang lain gitu. Nah sinergi inilah yang nanti akan kita evaluasi. PPATK porsinya apa pendidikannya, jangan-jangan sama dengan pendidikan di KPK materinya, jadi tidak saling menghargai, ini kan sesuatu hal yang tidak baik gitu, dalam arti kita bernegara, harusnya, bernegara kompak, satu plafon yang sama, tujuan bersama, *output*-nya dan jelas, oke, De, silakan De.

F-PDI PERJUANGAN (DEDE INDRA PERMANA, SH.):

Baik Pimpinan terima kasih.

Kepala PPATK yang saya hormati.

Tadi bapak sampaikan tentang ada penyitaan yang bisa dilakukan oleh PPATK, apakah aset itu bisa dijual dan apakah bisa masuk di potensi PNBP, itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

KEPALA PPATK:

Ya oleh para penyidiknya bisa dieksekusi untuk dikemudian masuk ke PNBP, beberapa dilakukan seperti itu, tapi tidak dalam kapasitas apa PPATK yang mulia, PPATK membongkarkan, mencarikan, kemudian penyidiknyalah yang kemudian, melakukan penyitaan untuk kemudian dijual, apa, pemasukan PNBP, demikian.

KETUA RAPAT:

Kiri, siapa yang tanya, Pak Nurdin. Pak Nurdin, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Izin Pak. Arteria dulu, yang muda dulu Pak

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

PPATK meluncurkan pencegahan programn ya, dan pemberantasan *green financial crime*, garis miring *money laundering*, kalau garis miring itu kan artinya hampir sama ini, tapi saya lihat ini kan dua hal yang berbeda Pak, nanti mohon penjelasan.

Kemudian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Pak Ivan, itu difokuskan untuk optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Padahal Pasal 1 angka 2, itu mengatur, tidak hanya TPPU tapi turut serta dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, semua yang ada di sini tidak pernah bicara terorisme hari ini Pak, jadi 2023 ini kita alpa teroris Pak ya, ini nanti mohon ditanggapi.

Berikutnya, untuk peningkatan penerimaan negara, serta mendukung program *green economy* dan penyelenggaraan Pemilu bersih tahun 2024, ini maksudnya apa nih, untuk peningkatan penerimaan negara, kan enggak nyambung ya, mendukung program *green economy*, *green economy* tuh apa. Kemudian penyelenggaraan Pemilu bersih tahun 2024, yang ada Pemerintahan bersih yang harus dipastikan Pak, bukan Pemilu yang bersih, pemerintahan ini yang sekarang bapak bersih bersih, gitu loh. Ini saya takutnya PPATK masuk ke ranah politik, bicara lagi, bicara asing, asing, asing, internasional, international, kita ini, kita Pak, enggak ada, enggak ada hebatnya, memang dijalanin semua Pak sama dunia internasional Pak, memang di Amerika sana berlaku ini PPATK, di Jepang sana berlaku, di Korea sana berlaku, enggak ada, kita aja ngotot sendiri, suruh sendiri Pak untuk urusan-urusan yang kaya gini. Kecuali yang di sosor itu lain. Saya ingin sampaikan begini Pak Ketua, Kepala, Pak Ivan ini orang baik, tapi Pak Ivan ini saya di seperti tidak melihat rapat kita hari ini Rapat RKA-KL, kita tidak bicara mengenai anggaran, Pak Ivan menyajikan tulisan-tulisan yang saya katakan ini adalah propaganda Pak, bukannya kajian anggaran ini Pak. Halaman 1 sampai halaman hampir setengah enggak ada, kemudian bicaranya rencana kerja dan anggaran ini Bab ke II Pak, tapi tidak bicara anggaran itu sendiri. 292 itu yang mana, Bapak jabarkan di halaman 6, coba halaman 6 buka semua Pak. Halaman 6, tiga tiga EBD pelayanan manajemen kinerja internal, ini uang semua, Bapak main *detailing*, kita juga butuh *detailing*, ininya apa, layanan manajemen kinerja internal, kemudian di 3375, layanan manajemen kinerja internal, 4 kali layanan dukungan manajemen internal, yang semuanya itu M M-an Pak, ditotal itu mungkin berapa puluh M, mungkin saja lebih dari 70 M, ini Pak yang masalah layanan.

Kemudian halaman, halaman tujuh ini Pak, buka Pak, tiga tiga, tujuh tujuh layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana manajemen kinerja internal, layanan sarana prasarana internal, bedanya apa sih. Bawahnya lagi, tiga tiga, enam lima, DCF, SCF, pelatihan bidang ekonomi dan keuangan, sama pelatihan bidang ekonomi dan keuangan juga sama Pak, ini loh. Ini kan Bapak bicaranya seolah-olah ini, tapi ya kita butuh detail lah, tiga tiga tujuh sembilan, peraturan lainnya product-nya apa, di depan juga sudah ada, BCE yang tiga tiga tujuh sembilan, BCE penanganan perkara. Di bawah juga ada penanganan perkara, di tiga-tiga delapan puluh, empat ini Pak. Nah Kerjasama, kerjasama apa, 4M sekian, komunikasi publik apa komunikasi publik, apa menjelaskan bahwa sudah ada aliran dana judi, itu komunikasi publik, aliran dana judi yang sampai ke oknum Polri Pak, ini pernyataan Bapak 8 hari yang lalu, saya butuh penjelasan. Kalau oknum Polrinya, siapa oknum Polri ya Pak, itu Bapak buka itu di Pikiran Rakyat aja udah ada Pak.

Kemudian juga mengenai sarana bidang teknologi informasi. Ini dari pengelolaan teknologi informasi, tiga tiga delapan satu nomenklaturnya Pak, di sarana bidang teknologi informasi, itu 67 M Pak, dominan sendiri, coba halaman 7 juga paling bawah. Nah kami butuh penjelasan, tiga tiga delapan dua pemantauan lembaganya seperti apa yang DKC itu Pak, 4,7 lembaga mana saja yang diawasi Pak Ivan.

Nah kemudian ada lagi penanganan perkara, penanganan perkara ini sampai 3 Pak, terakhir juga di bawah ini penanganan perkara.

Nah berikutnya kami ingin sampaikan mengenai fokus rencana kerja, ini yang bagian berikut Pak. Ini bapak katakan untuk optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, membantu pengamanan Pemilu serentak dari praktik *money politics*, maka perlu perhatian lebih atas kesiapan dan penguatan sarana prasarana teknologi informasi, seperti apa kerjanya, memantau. Yang perlu Bapak pantau itu kementerian lembaga BUMN Pak, perdagangan pengaruhnya tiap hari, kementerian lembaga dan BUMN itu dipantau Pak. Jadi seolah-olah ini Pemilu serentak ini jahat bangetlah, harus dibuat seperti ini, saya juga berpikir begini lho Pak, bukannya saya berasumsi ya, jangan-jangan semua yang ada di sini pak, pastinya ada *money politics*, atau perdagangan pengaruh, mohon maaf juga Pak Ivan ada duduk di sini sama teman-teman, ada perdagangan pengaruh juga, kalau kita mau jujur, kita mau jujur apa enggak ini, kalau mau buka-buka aib, kita buka-bukaan, tapi kalau kita ingin melakukan penghormatan antar lembaga, daulat partai politik, lakukanlah secara terhormat, kami tersinggung, benar Pak. Praktik *money politic*, praktik apa, yang lain dong diawasi Pak, pemilu serentak apa yang ngaco di partai politik, itu loh. Ini jangan-jangan ini kita ini kemasukan antek asing Pak, isunya adalah sosialis demokrat, anti korupsi, semuanya bersih, semuanya bersih, enggak ada yang bersih, gitu loh. Kami mohon sekali ini tolong, bukan apa ya otaknya dicucilah ya, jangan berpikiran yang macam-macam.

Berikutnya juga kami ingin sampaikan, ini halaman 9, untuk itu pada tahun 2023, pengelolaan teknologi informasi telah menyusun program, program mana yang berhubungan sama ini Pak, praktik *money politic* dan Pemilu bersih, itu halaman 7 Pak.

Berikutnya penguatan sinergi dan mendukung transparansi akuntabilitas Pemilu ya. Ini kita ingin sampaikan Pak, mohon maaf Pak, Bapak harus ngecek, yang

buat materinya siapa ini, anak buah kan, materi di halaman 9 antara judul dan penjelasan materi ini tidak sama, sama sekali Pak. Coba Bapak baca, judulnya, dua, penguatan sinergi untuk mendukung, tapi penjelasannya tidak ada, baru ada di terakhir. Nah D, melaksanakan edukasi publik mengawasi pemilu bersih. Tapi kan kalau kita lihat kaya begini, kesannya ada tensi khusus, padahal Bapak cuma masukan kalimat terakhir, Pemilunya di sini Pak, tolong paparan ini juga harus lebih hati-hati.

Berikutnya peningkatan kerjasama internasional. Ini saya sepakat Pak, pahami siapa kita, pahami siapa negerimu, pahami siapa rakyat dan pemerintahmu, itu bahasa yang saya diajarkan sama Pimpinan saya Pak, kalau mau bicara bersih ideal, kami lebih paham orang-orang politik Pak, tapi kami berada di tempat-tempat yang tidak ideal, kami berusaha untuk tegak lurus dan selalu menjadi ideal, kalau model kaya gini nih, ini di, hidup di ruang hampa, karena acuan Bapak ini bukannya apa-apa ini, ini saya bukan mengatakan Bapak harus belajar Pancasila dan Empat Pilar, bukan, tapi saya kira kok acuannya internasional, anggotanya siapa saja, tahu enggak kita ini konsep negara kepulauan, orang baca tulis aja masih banyak yang enggak bisa baca Pak, Bapak bicara seolah-olah hidup di dunia hampa ini ya, sedih saya ngelihat yang seperti ini Pak ya, agar kita dapat menentukan standar kebijakan global, ini bukannya Bung Karno punya urusan Pak, kita ini kita pahami jati diri kita, ya Pak ya.

Pak sebentar Pak, ini masih ada penjelasan Pak. Ini mengenai masalah LHA. LHA ini jadi masalah. Pak sekarang ini **TPPU**, Bapak ini tiga tujuh dua, tiga tujuh delapan plus TPPU, tiga tujuh dua, tiga tujuh delapannya sudah selesai di Polisi, di Jaksa, tapi nunggu Pak, nunggu LHA-nya PPATK, ini ngaco jadinya, proses *criminal justice system* itu kacau. Nunggu LHA Bapak itu sampai enam bulan, delapan bulan, dua tahun Pak, perkaranya enggak jalan. Nah sedangkan kalau kita mau tiga tujuh dua, tiga tujuh delapannya saja jalan, enggak bisa, nanti dicurigai sama teman-teman PPATK, kok ini kita lepas. Nah yang seperti itu kalau enggak kuat, pasukannya belum sempurna, belum siap, ya jangan main terlalu banyak urusan, jadi banyak yang terhambat juga ini.

Kami juga ingin sampaikan ini Pak, kami ingin penjelasan masalah judi *online* mengalir ke 608 miliar dana bank, yang terindikasi judi *online*, ratusan triliun transaksi judi *online*. 800,4 M mengalir ke oknum Polisi dan BNN. Nah ini pernyataan-pernyataan seperti ini kami mohon klarifikasi hari ini, sebelum kita menyetujui Pak.

Berikutnya mengenai alokasi tambahan. Ini bapak di halaman 17, saya persingkatlah ini ya. Di halaman 16-nya, prioritas nasional, saya kaget, prioritas nasional Bapak itu ternyata mengadakan diklat, jadi PPATK seperti Badiklat, nah kan lucu Pak.

Berikutnya lagi Pak, 17, tambahan alokasi anggaran 75 M, kita sepakat, Pak Ivan kan kita bersahabat, semua untuk PPATK saya setuju untuk penambahan, tapi yang rasional, coba dibuat halaman 17, ini untuk apa, program kerjanya bagaimana, *output*-nya gimana, capaian kinerjanya apa, sehingga kita wajib untuk menyetujui. Kami mohon sekali Pak ya, halaman 19 ya, dan halaman 18 peningkatan kualitas IT, dampaknya adalah percepatan layanan kinerja, untuk apa.

KETUA RAPAT:

Oke Ter, karena waktu ya, pada prinsip aku paham. Kesimpulannya Bapak ibu sekalian, rapat dengan PPATK akan kita lanjutkan tanggal 13 untuk mereka perbaiki apa hal-hal yang hari ini dikritik sama Arteria Dahlan, boleh ya. Oke tidak perlu dijawab, kita akan minta perbaikan. Tolong langsung tanyangkan kesimpulan saja rapat hari ini, poin ke tiga ada rapat dilanjutkan pada tanggal 13, tolong tanyangkan, poin tiganya lanjutkan tanggal 13 ya, eh jangan keluar dulu, ini masalah lu, karena lu banyak catatan gue tunda rapatnya.

Oke dibacakan, diperbesar ya, itu belum bisa menerima dong, yang nomor 1 dikoreksi, belum bisa menerima itu, karena rapat ada lanjutan, karena ada hal-hal yang ya, untuk mereka perbaikan. Ini rapat atau apaan nih, ngerumpi aja.

Tolong Sari bacakan ya, kesimpulan ini.

F-P GOLKAR (IR. Hj. YULIATI, MT.):

Komisi III DPR RI, belum dapat menerima penjelasan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI atas pagu anggaran tahun 2023 setelah Nota Keuangan Presiden RI sebesar Rp.292.016.662.000,-

Dua, Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat kerja kembali.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Pimpinan interupsi dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Tanya dulu satu ini disetujui, baru kedua.

F-P GOLKAR (IR. Hj. YULIATI, MT.):

O siap-siap.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Saya belum setuju kok. Ini kenapa kok tiba-tiba bisa tidak menerima penjelasan, padahal kita tahu dari tadi Ketua PPATK sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau terkait pengawasan mungkin kita bisa tanggal 13, tapi kalau ini kan hanya apa persetujuan RKA-KL.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya, saya pikir dapat menerimalah.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Dapat menerima gitu lho.

Anggota Komisi III: Arteria

Kan mengkritisi kan buat konstruktif ya.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Ya.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya, bukan sampai.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Itu Pimpinan.

Anggota Komisi III:

Dapat.

KETUA RAPAT:

Ya dari paparan, izin saya menjelaskan, saya merespons dari Pak Arteria, dari catatan Pak Arteria, apa yang dipresentasikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam konteks anggaran berbasis kinerja, berarti kita belum bisa terima, agar *paper* yang ada harus diperbaiki begitu Pak.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, SH. M.Hum.):

Pimpinan, mungkin bahasanya jangan tidak dapat diterima Pimpinan, mungkin rapat dilanjutkan tanggal 13 untuk memperdalam terkait dengan masalah RKA-KL ini, jadi mungkin begitu saja. Kalau belum dapat menerima ini kan nanti khawatir konotasinya kurang bagus gitu, jadi kalau melanjutkan untuk pendalaman tanggal 13, dilanjutkan pendalaman pembahasannya, itu mungkin lebih bijaksana begitu, usul Pimpinan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya inikan. Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yak silakan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak ini kan datangnya terlambat, tapi Pak Adies itu mencari jalan keluar, walaupun demikian, saya ini tetap sepakat sama Pak Adies jadinya.

KETUA RAPAT:

Jadi setuju?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Setuju untuk dapat menerima Pak.

KETUA RAPAT:

Dapat menerima atau kita perdalam dulu untuk tanggal 13, kalau menerima kita tidak perlu tanggal 13 nya.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Saya pikir nya ini hanya masalah ini Pak, masalah penyajian dan ke depan, kita pernah punya pengalaman, ada mitra yang sama seperti mereka, tapi pada rapat berikutnya mereka melakukan perbaikan dan saya pikir ini enggak usah diperdalam lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Oke kita tanya Ketua PPATK, ini nanti papernya mau diperbaiki atau apa atau kita perdalam?

KETUA PPATK:

Siap-siap, kalau di, di minta kembali oleh yang mulia, akan kita perbaiki, ya.

KEPALA RAPAT:

Ya enggak kita catatan tidak menerima atau menerima?

KEPALA PPATK:

Ya jangan sampai tidak menerima.

KETUA RAPAT:

Iya kan itu.

KEPALA PPATK:

Kita tida ada intensi, artinya kan ini kan berasal dari komunikasi.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua sedikit, ini penjelasan Pak Ketua, penjelasan.

KETUA RAPAT:

Sebentar satu-satu Pak Arteria, satu-satu.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini selesai, tapi ada teman teman kan belum nanya, mungkin bukan karena tidak menerima.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya Habib mau nanya, catatannya apa Bib?

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ya betul. Pimpinan ini kalau mau ditutup sekarang, tadi kan masih banyak di kita, termasuk saya belum bertanya, gitu jadi.

KETUA RAPAT:

Karena jam empat aja, ini jam empat ada BNN ya?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Diskors.

KETUA RAPAT:

Mau diskors atau apa, saya sih terserah saja.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Saya rasa di-*pending*, sampai rapat berikutnya, tanggal berapa itu.

KETUA RAPAT:

Di pending sampai tanggal 13, atau di-*pending* nanti sampai malam.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ya sampai tanggal 13, jadi ada waktu juga kalau mau ini perbaikan, tapi.

KETUA RAPAT:

Terserah. Pak Ichsan ada pendapat.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan saya kira, memang masih banyak kawan yang belum menjawab, dan juga saya sendiri juga melihat laporannya masih kurang *firm* Pak ya. Artinya kita rapat hari ini adalah rapat anggaran, dari sekian, mungkin ada 20 halaman, ya 20 halaman, dari 22 halaman ini kita berbicara anggaran hanya dua atau tiga lembar Pak Ketua PPATK. Jadi mungkin tolong angka-angka ini lebih diperjelas lagi, sehingga saya usulkan mungkin ini jangan dibuat kesimpulan dapat menerima tidak, tapi kita membuat laporan *pending* untuk kita, untuk melanjutkan kembali pada tanggal 13 September, karena kita nanti dikejar-kejar juga dengan BNN nanti sore, yang mesti selesai juga. Jadi jangan sampai semua enggak selesai.

Jadi lebih baik kita *pending* PPATK, kesimpulannya nanti setelah ada penjelasan-penjelasan, penjelasan yang lebih jelas, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke kalau begitu kesimpulannya, rapat akan kita lanjutkan pada tanggal 13 yang akan datang, cocok, dalam rangka perbaikan, ya, dalam rangka perbaikan aja.

Tolong dirubah, enggak usah ada tambah-tambah, satu aja, atau catatan rekomendasi tadi, karena catatan Sekretariat Komisi III ya, surat menyurat dengan PPATK tuh cuma ada dua surat, Rekomendasi Jejak Calon Hakim Agung Ad Hoc, permintaan Komisi III. Undangan Silatnas ya, ya ... oleh. Jadi surat kita dengan PPATK ini tidak seperti yang digambarkan Pimpinan PPATK, seolah-olah surat mereka ke kita. Jadi catatan Komisi III Sekretariat itu cuma ada permintaan dari kami, Undangan dari PPATK, tidak pernah ada rekomendasi yang datang ke kita, nah ini ke depan kita perbaiki ini ya.

Nah kalau saya mengusulkan bahwa rekomendasi ini bisa masuk hari ini gitu loh, untuk mengingatkan bahwa ini ada lanjutnya. Jadi rekomendasi, nah Sari tolong dibacakan lagi, Bu Sarry, yang nomor dua, nomor dua, nomor satu dulu.

F-P GOLKAR (Ir. Hj. YULIATI, MT.):

Jadi di ulang ya, oke.

Satu, Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat kerja kembali dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI, untuk melakukan pendalaman pada hari Selasa 13 September 2022.

KETUA RAPAT:

Setuju Bapak Ibu Anggota, Kepala PPATK.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya interupsi.

KETUA RAPAT:

Setuju ya.

KEPALA PPATK:

Iya.

(KETOK PALU 1X)

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya dari tadi interupsi Ketua, tidak didengar.

Saya mau bertanya, terkait dengan nomor satu ini, seakan-akan rapat ini tidak menghasilkan apa terkait pembahasan anggaran.

KETUA RAPAT:

Belum Pak.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Oke-oke, dengar dulu, boleh didengarkan dulu?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Kemudian, kalau memang kita mau berbicara bahwa ada angka-angka yang kita tidak setuju ya di situ, maka diberikan poinnya, supaya ini tidak mengambang.

KETUA RAPAT:

Contoh, kasih contoh aja Pak.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya contoh, saya mengamati semua pembicara-pembicara dari tadi, tidak ada penanya atau penanggap yang berbicara tentang angka-angka yang disebutkan oleh PPATK yang di protes langsung.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Keberatan Ketua, keberatan saya bicara angka-angka secara detail Pak Ketua, saya kan bisa diulang aja videonya.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Boleh saya bicara dulu Pak Arteria?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya enggak, saya keberatan, saya cuman keberatan aja.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan tuntaskan dulu.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, tidak ada yang mempersoalkan angka-angkanya, seperti apa yang harus dievaluasi, saya tadi menyebut angka-angka juga, kalau hanya menyebut angka, tetapi kan tidak menyampaikan secara spesifik Pak Ketua, bahwa ini saya tidak setuju, karena menurut analisa saya, ini membengkak atau ini kurang, tidak ada kalimat itu yang keluar, olehnya itu sangat naif rasanya ini, kita rapat begini, lalu kita tidak menyatakan menyetujui atau tidak menerima, apa yang menjadi pembahasan tentang anggaran.

KETUA RAPAT:

Tolong dibaca pak, apa maksudnya yang nomor satu, baca dulu.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pak Ketua di atas ini tidak ada mengatakan menerima Pak, coba baca sendiri Pak.

KETUA RAPAT:

Memang belum menerima.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Itulah saya katakan tadi, makanya didengarkan baik-baik kalau saya bicara Pak Arteria, jangan dipotong-potong.

Saya menyampaikan ini secara serius ini Pak Ketua, bahwa kita rapat pada hari ini adalah rapat membahas tentang anggaran *oke*, anggaran yang diberikan kepada kita ini simpel sekali, pagu anggaran 2023 sekian, usulan tambahnya sekian, nota keuangan secara total sekian. Saya menyampaikan bahwa tidak menemukan ada angka-angka yang disebutkan oleh PPATK secara angka-angka permintaan yang patut saya harus tunda, bahwa nanti di ke hari Selasa baru kita lanjutkan, tidak ada, buat apa kita tunda.

ANGGOTA KOMISI III:

Pimpinan.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Jadi buat apa kita tunda, menurut saya.

Yang kedua, pada poin-poin tertentu yang mau disepakati adalah itu menyangkut masalah pengawasan, kita tidak berbicara tentang pengawasan hal malam ini atau sore ini, tetapi bicara tentang anggarannya, karena itu ada hubungannya.

KETUA RAPAT:

Ada paham, sebentar Pak, anda paham bahwa anggaran berbasis kinerja itu apa Pak?

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya paham.

KETUA RAPAT:

Apa yang anda pahami.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya saya paham bahwa pengawasan yang kita lakukan terhadap kegiatan kaya PPATK itu membutuhkan anggaran, tetapi tidak ada, coba dilihat dari pembahasan dari awal, tidak ada pembahasan satu poin pun, bahwa ada kegiatan kegiatan pengawasan yang kita lakukan terhadap PPATK, kita nyatakan bahwa ini tidak layak dengan angka-angka sekian, tidak ada.

KETUA RAPAT:

Pak Supri.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya punya hak bicara sendiri ini, persoalan ini.

KETUA RAPAT:

Pak Supri.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sebagai Anggota Komisi III.

KETUA RAPAT:

Pak Supri, saya ingatkan, kinerja itu ya mengawasi Pak, saya ingatkan, jadi kalau anggaran tidak berbasis kinerja anda betul, kalau mau berbasis kinerja kerja, kita mau bantu mereka kok intinya, kenapa kita tunda, agar kedepannya sinkron. Pertanyaannya adalah mereka ini dengan anggaran segitu, dengan apa yang hari ini digambarkan Pak Hinca demikian banyak lalu lintas sekian triliun triliun itu, anggaran itu cukup enggak, IT cukup enggak, maka yang dipaparkan Arteria Dahlan tadi dengan catatan yang jadi begini, itu rasanya kurang representatif. Maka saya sebagai Pimpinan, ingin ini diperbaiki dalam rangka untuk rapat lanjutan, itu saja Pak.

Jadi kesimpulannya sesuai dengan usulan Pak Adies Kadir seperti itu, gitu Pak. Saya ulang Bapak Ibu setuju dengan kesimpulan, oke, yang tidak setuju cuma Pak Supriansa.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nasir.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Ya begini kalimatnya itu kan enggak jelas juga, melakukan pendalaman apa, kan begitu, jadi maksud saya Ketua harus dicantumkan juga, sebabkan yang membaca kesimpulan ini kan.

KETUA RAPAT:

Usulan Pak Nasir pendalaman apa?

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Yang Pak Ketua sampaikan tadi.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua, Pak Ketua usulan redaksional konkritlah. Untuk melakukan pendalaman program kerjanya enggak usah, itu aja.

KETUA RAPAT:

Oke, yang mana yang dicoret Pak Arteria?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Untuk melakukan pendalaman itu dicoret.

KETUA RAPAT:

Jadi?

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Langsung pada hari selasa 13 September.

KETUA RAPAT:

Oke, coret.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Kalau ini netral.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Pimpinan, Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Adies.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Jadi sesuai dengan agenda rapat kita hari ini kan pembahasan RKA-KL, nah ini kan kawan-kawan masih banyak belum puas terhadap pembahasan RKA-KL hari ini, dan waktunya kita kan mepet ini, karena ada BNN, jadi itu ditambahkan di situ, jadi dalam pendalaman tentang RKA-KL 2023. Jadi nanti pembahasannya juga kita tentang RKA-KL, jadi memang tidak usah membahas ke sana kemari, kalau kita mau pengawasan, nanti kita panggil lagi.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Urusan pengawasan ini kan RKKAL yang mendesak nih.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Yang mendesak ya.

KETUA RAPAT:

Tolong ditambah ya. Dipertegas saja.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Jadi itu dulu.

KETUA RAPAT:

Dipertegas saja. Begitu Pak Adies.

F-P GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Ya begitu saja.

KETUA RAPAT:

Bapak-Bapak ada yang keberatan lagi, enggak diterima juga enggak masalah Pak, udah kalah puting ya, ya setuju ya, Pak Supri yang tidak setuju, kalau dia setuju belakangan enggak papa.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tunggu dulu Pak Ketua... Kalau saya tidak setuju, kalau dirubah, saya setuju.

KETUA RAPAT:

Oh setuju, oke kalau setuju kita ketok kalau gitu.

(RAPAT:SETUJU)

Yang kedua, Bu Sari bacakan.

F-P GOLKAR (Ir. Hj. YULIATI, MT.):

Dua, Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI, untuk menyampaikan hasil-hasil rekomendasi, terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Saya sampai, apa yang disampaikan Pak Adies tadi, kalau ini kan menurut saya poin dua ini sudah masuk ke pengawasan, jadi kita karena hari ini membahasnya anggaran, jadi poin dua ini tidak perlu ada, nanti kita panggil aja enggak usah pakai udah masuk dalam kesimpulan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bapak Ibu sekalian cocok?

ANGGOTA KOMISI III:

Cocok.

KETUA RAPAT:

Out. Satu saja.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Enggak usah pakai nomor kalau begitu.

KETUA RAPAT:

Jangan pakai nomor.

Oke dengan demikian ini cukup sampai di sini, mohon maaf, oke gimana Pak.

KEPALA PPATK:

Ya kami ikut dengan keputusan bersama, dalam forum yang sama-sama kita muliakan ini, demikian Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dengan demikian, karena kita sudah menyita waktu rapat dengan BNN untuk itu saya tutup rapat kita dengan PPATK hari ini.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(KETOK PALU 3X)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001